

## **CONSCIOUSNESS RAISING DAN PARTISIPASI POLITIK SUKU BADUY DI ERA DIGITAL (TINJAUAN AWAL)**

### ***Consciousness Raising and Political Participation Baduy People in Digital Era***

M. Ghozali Moenawar<sup>1</sup>, Wahyu Budi Priatna<sup>2</sup>, Hudi Santoso<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Al Azhar Indonesia

<sup>2</sup>Institut Pertanian Bogor (IPB)

<sup>3</sup>Sekolah Vokasi IPB

E-mail: [ghozali@uai.ac.id](mailto:ghozali@uai.ac.id)

#### **ABSTRACT**

*Development communication can play a role in the development of isolated rural communities from the metropolis world. The Baduy people that lives at the foot of the Kendeng Mountains in Kanekes Village, Leuwidamar District, Lebak-Rangkasbitung Regency, Banten, still maintains its customs and culture in the digital era. On the other hand, through the concept of critical awareness from Paulo Freire, the Baduy people is very likely to change towards a more dynamic condition. This study uses a qualitative method with an analytical descriptive approach, through interview techniques and library research. The results of the study indicate that consciousness raising as a process of development communication and community empowerment can be used as a tool to measure political participation in the Baduy people. Their significant involvement in the 2014 General Elections and 2017 Regional Elections (Pilkada) is proof of the Baduy people's compliance with government regulations. Even though in certain situations customary structures have the power to prohibit their people from participating in elections or regional elections.*

**Keywords:** *consciousness raising, development communication, political participation*

#### **ABSTRAK**

Komunikasi pembangunan dapat berperan dalam pengembangan masyarakat pedesaan yang terisolir dari dunia metropolis. Kelompok Suku Baduy yang tinggal di kaki pegunungan Kendeng di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak-Rangkasbitung, Banten, hingga kini masih mempertahankan adat dan budayanya di era digital. Di lain pihak, melalui konsep kesadaran kritis dari Paulo Freire, Suku Baduy sangat memungkinkan untuk berubah menuju kondisi yang lebih dinamis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui teknik wawancara dan *library research*. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa *consciousness raising* sebagai proses komunikasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur partisipasi politik pada Suku Baduy. Keterlibatan mereka yang cukup signifikan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 menjadi bukti ketaatan Suku Baduy terhadap aturan pemerintah. Meskipun dalam situasi tertentu struktur adat memiliki kekuasaan untuk melarang masyarakatnya mengikuti Pemilu atau Pilkada.

**Kata kunci:** *consciousness raising, komunikasi pembangunan, partisipasi politik*

#### **PENDAHULUAN**

Konsep komunikasi pembangunan telah banyak dibahas oleh para ahli. Secara umum mereka setuju bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam pembangunan. Everett M. Rogers (1989) menyatakan komunikasi merupakan dasar dari unsur perubahan sosial di masyarakat. Secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak dari suatu bangsa. Oleh karena itu peranan

komunikasi dalam pembangunan harus dikaitkan dengan arah perubahan tersebut. Artinya kegiatan komunikasi harus mampu mengantisipasi gerak pembangunan. Di dunia akademik, studi tentang komunikasi pembangunan, setidaknya sudah dikembangkan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) yang banyak melakukan penelitian pada aspek pembangunan masyarakat di pedesaan maupun perkotaan, serta memiliki sikap saling mendukung dengan studi sosiologi (Sajogyo, 1997).

Peranan komunikasi dalam pembangunan terlihat jelas pada aktivitas perkembangannya. Media massa dan pendidikan di era digital berperan dalam pengerahan berbagai sumber daya, yaitu mempercepat dan menggerakkan jarak yang lambat dari transformasi sosial yang dibutuhkan untuk mengembangkan ekonomi, dan terutama untuk mempercepat dan memperhalus tugas dari pengerahan sumber daya manusia di balik usaha negara (Schramm, 1991). Media massa berperan juga sebagai alat yang diharapkan untuk mempersiapkan individu demi perubahan dengan membentuk suasana modern (Rogers, 1991). Media digital merupakan agen penting modernisasi. Orang-orang dalam masyarakat tradisional dapat meningkatkan empati mereka dengan pengeksposan terhadap media massa yang memperlihatkan tempat-tempat baru, perilaku-perilaku baru, budaya-budaya baru, dan lain-lain. Singkatnya, media di era digital memiliki potensi untuk mengisolasi komunitas tradisional dan mengganti struktur hidup, nilai, dan perilaku komunitas tersebut dengan struktur-struktur yang ditemukan di masyarakat Barat modern (Harun dan Adrianto, 2011).

Pembangunan yang dilakukan di Indonesia dewasa ini nampaknya masih tidak jauh dari konsep pembangunan yang bertumpu pada fisik, yaitu faktor materi dan produksi menjadi perhatian utama. Menurut Budiman (2000), pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok, yaitu masalah materi yang mau dihasilkan serta dibagi, dan masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif yang menjadi manusia membangun. Sebab itu faktor-faktor non-material seperti faktor internal individu dan lingkungan sosial kurang mendapat perhatian, termasuk pada lingkungan sosial suku Baduy di Wilayah Banten. Untuk itu diperlukan pemberdayaan masyarakat Baduy melalui pendekatan yang memungkinkan untuk dapat berubah menuju kondisi yang lebih baik.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan kemanusiaan bagi Suku Baduy adalah pendekatan kesadaran diri (*consciousness raising*). Hal itu dapat dimungkinkan dengan mempertimbangkan fenomena sosial dan tuntutan adanya perubahan. Sebagaimana yang pernah dilakukan Paulo Freire (1921-1997) terhadap kelompok masyarakat yang mengisolasi diri di Brasil.

Di Baduy, proses pendekatan ini dimulai dari hati dan pikiran mereka sebagai kelompok masyarakat yang bersedia dibantu atau diberdayakan. Ketika mereka menyadari bahwa mereka tertinggal dan menderita, pada saat itu juga mereka siap membuka diri dari keterkungkungan dan siap menerima sesuatu yang baru yang datangnya dari luar.

Paper ini bertujuan untuk mendeskripsikan diskursus *consciousness raising* dalam konteks pengembangan masyarakat suku Baduy terutama bagaimana mereka berpartisipasi politik di era digital. Dalam pembahasannya, penulis berangkat dari pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam konteks komunikasi pembangunan, lalu definisi mengenai *consciousness raising* serta perkembangannya dalam perspektif kesadaran partisipasi politik di wilayah Banten dengan mempertimbangkan konsep kesadaran kritis Paulo Freire,

kemudian dilanjutkan pembahasan tentang aspek dan pendekatan *consciousness raising* sebagai strategi komunikasi pembangunan dan aplikasinya dalam pengembangan masyarakat Suku Baduy sebagai studi kasus.

### TINJAUAN PUSTAKA

*Consciousness raising* atau konsientisasi merupakan istilah khas yang dicetuskan oleh Paulo Freire. Menurut Freire (1999), konsientisasi adalah sebuah proses dialektis dimana kaum miskin dan tertindas makin lama makin sadar akan situasi ketertindasannya dan kemudian berkehendak untuk mengubah kondisinya. Proses dialektis yang dimaksud adalah aksi-refleksi-aksi yang kemudian menjadi kesatuan praksis. Konsep ini dilatarbelakangi oleh asumsi bahwa realitas sosial yang ada, secara historis bukan sesuatu yang jatuh dari langit, melainkan dibentuk oleh manusia. Freire memang sangat kritis terhadap pendidikan tradisional di Brasil yang bercirikan menggurui dan hafalan. Cara semacam itu dinilainya akan mengalami kegagalan dalam mendewasakan manusia, yang diharapkan mampu ikut serta menentukan nasib sendiri. Asumsi ini hamper sama dengan pandangan Berger dan Luckmann (1966) yang memandang bahwa eksistensialitas manusia dalam masyarakat itu terjadi melalui proses dialektis yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Meski studi Freire lebih banyak menyingkap pada aspek kekuasaan sebagai penindas, dimana proses pembebasan berlaku terhadap semua manusia yang tertindas maupun penindas, namun hakikatnya kajian konsientisasi Freire juga berlaku bagi masyarakat terpinggirkan, seperti halnya diindikasikan bagi masyarakat Baduy. Dalam hal ini, Freire mengidentifikasi tiga tingkatan kesadaran, yaitu semi-intransitif, kesadaran naif, dan kritis transitif (Manggeng, 2005) sebagaimana dijelaskan berikut ini.

**Pertama, Kesadaran Semi-intransitif atau kesadaran magis.** Tingkat kesadaran ini ditandai dengan penerimaan terhadap penjelasan magis atau eksternal atas keadaan individu atau komunitas, dengan menghubungkan situasi dengan kekuatan superior atau agen luar di mana mereka tidak memiliki kontrol sehingga mereka harus patuh. Kesadaran ini fatalistik. Hidup berarti hidup di bawah otoritas orang lain atau hidup dalam ketergantungan.

**Kedua, kesadaran naif.** Tingkat kesadaran ini menganggap masalah sebagai kebetulan, yang disebut Freire sebagai *transitivitas naif*. Pada tingkat ini, seseorang sudah memiliki kemampuan untuk mempertanyakan dan mengenali kenyataan, tetapi masih dicirikan oleh sikap primitive dan naif, seperti: mengidentifikasi dirinya dengan elit, kembali ke masa lalu, bersedia menerima penjelasan yang telah dibuat, sikap emosional yang kuat, banyak polemic dan perdebatan tetapi bukan dialog, dan masalah individualisasi.

**Ketiga, kesadaran kritis transitif.** Pada tingkat ini, seseorang berhenti melihat masalah sebagai kebetulan tetapi lebih sebagai masalah struktural. Kesadaran kritis transitif ini dicirikan oleh kedalaman menafsirkan masalah, keyakinan dalam diskusi, mampu menerima dan menolak. Pembicaraan bersifat dialog dua arah dan didasarkan pada kemampuan untuk melihat hubungan kausalitas (Collins, 2001; Manggeng, 2005).

## METODE PENELITIAN

Kebutuhan yang mendasar akan potret dan lokus penelitian ini, sebagai langkah awal dipilih penelitian kualitatif deskriptif berbasis kepustakaan dan wawancara responden di lapangan. Jenis penelitian ini dimungkinkan karena disain kajiannya berupa dokumentasi seperti buku, jurnal, surat kabar termasuk menggunakan teori-teori dari berbagai literatur. Djam'an Satori (2014) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Selain itu, Sugiono (2015) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, teknik wawancara dan observasi mendalam kepada warga-warga Baduy. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini adalah wawancara dan observasi mendalam yang dilakukan langsung dengan masyarakat Baduy. Kemudian, data sekunder yang didapat, yaitu dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang interaksi masyarakat Baduy dengan orang luar Baduy.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dari berbagai sumber yang relevan dan membahas secara deskriptif berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, terutama berkaitan dengan upaya proses pembangunan dan pemberdayaan perubahan suku Baduy melalui partisipasi politik pada Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Consciousness Raising*

Pengertian Konsientisasi dari Bahasa Inggris, berasal dari kata *conscience*; kata hati, suara hati, hati nurani (Echols dan Shadily, 1975). Sedangkan *consciousness raising* dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai peningkatan kesadaran. Kesadaran dalam konteks *consciousness raising* yang dibahas adalah berkaitan dengan kondisi seseorang yang berkaitan dengan hidupnya dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Meisner (2014:155) mendefinisikan *consciousness raising* sebagai suatu strategi perubahan sosial yang merupakan bentuk komunikasi ataupun aktivitas lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seseorang atau masyarakat tentang kondisi spesifik mereka atau cara untuk mengatasinya.

Terminologi *consciousness raising* digunakan lebih banyak untuk mendeskripsikan strategi gerakan perempuan dalam feminisme gelombang kedua. Para aktivis perempuan menggunakan strategi komunikasi yang berbasis pada membangkitkan kesadaran perempuan akan ketertindasan mereka untuk mengedepankan isu-isu yang berkaitan dengan gender. Selain itu, *consciousness*

*raising* dapat juga merujuk pada istilah Bahasa Inggris dari *conscientização* (Bahasa Portugis) atau *konsientisasi* (Bahasa Indonesia) yang berarti penyadaran yang berkaitan dengan teori Paulo Freire yang banyak digunakan dalam pendekatan komunikasi pembangunan di masa kini.

Proses konsientisasi, yaitu pembangkitan kesadaran kritis atau *critical consciousness raising* (*conscientização* dalam Bahasa Portugis, bahasa asli Freire) yang digagas Paulo Freire, merupakan proses pembangkitan kesadaran yang berakar dari ilmu pedagogi atau pendidikan dan pengajaran, khususnya pendidikan orang dewasa. Aspek yang mendasari konsientisasi Freire ini mirip dengan prinsip *consciousness raising* para feminis yang telah dijabarkan sebelumnya, yaitu berasal dari ketertindasan dan mengedepankan aksi kolektif dan dialog dalam mencapai perubahan sosial. Akan tetapi, konsientisasi Freire ini berbeda dengan *consciousness raising* pada gerakan perempuan karena pada *consciousness raising* gerakan perempuan dapat melibatkan transmisi pengetahuan yang telah dipilah sebelumnya (*preselected knowledge*), yaitu peningkatan kesadaran terjadi pada pengungkapan pengetahuan tersebut (Goldbard, 2006).

Kesadaran merupakan konsep yang menghubungkan proses individu dan kolektif sehingga proses individu seperti identifikasi, kognisi, emosi dan motivasi menghasilkan aksi. Definisi melibatkan empat unsur-unsur independen: (1) perasaan bahwa nasib seseorang terkait dengan anggota lain dari kelompok atau kategori (gay, petani, perempuan, kulit hitam), (2) puas dengan kekuatan dan pengaruh kelompok, (3) keyakinan bahwa perbedaan kekuasaan adalah hasil dari struktur daripada faktor-faktor individu, dan (4) orientasi kolektif menebus ketidakadilan (Stekelenburg, Klandermans 2007).

Konsep penyadaran tidak menyebabkan orang untuk fanatisme merusak. Sebaliknya, dengan menciptakan penyadaran memungkinkan orang untuk memasuki proses sejarah sebagai subjek yang bertanggung jawab. Penyadaran membantu mereka dalam mencari penegasan diri dan dengan demikian menghindari fanatisme. Kebangkitan kesadaran kritis sebagai cara untuk ekspresi ketidakpuasan sosial yang merupakan komponen nyata dari situasi yang menindas (Freire 2000).

Dalam konsientisasi Freire, peningkatan kesadaran berarti mendobrak mitologi yang ada untuk meraih tingkat kesadaran baru khususnya kesadaran akan ketertindasan, menjadi obyek dari kuasa seseorang daripada subyek yang memiliki keinginan sendiri. Proses konsientisasi meliputi mengidentifikasi kontradiksi dalam pengalaman melalui dialog, sehingga menjadi bagian dari proses mengubah dunia. Freire menemukan bahwa mereka yang dirugikan dalam masyarakat –kaum tertindas– tidak menyadari posisi ketertindasan mereka dan bahkan takut akan kebebasan dan proses penyadaran diri sendiri (Freire, 2000).

Berangkat dari kenyataan tersebut, Freire, mengembangkan suatu proses pembelajaran yang dimulai dari penempatan fisik, emosional dan intelektual seseorang untuk kemudian membawa mereka menuju kesadaran kritis akan situasi ketertindasan mereka, termasuk di dalamnya mengerti tentang struktur dominasi atau kekuasaan, dan apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaikinya (Collins, 2001). Bagi Freire, proses konsientisasi atau pembangkitan kesadaran kritis ini adalah proses melawan “dehumanisasi” atau proses perjuangan “humanisasi”, baik bagi kaum tertindas maupun kaum penindas.

Dengan kata lain, menurut Freire, konsientisasi tidak hanya ditujukan untuk mereka yang terpinggirkan tetapi juga bagi para penindas mereka atau pemilik kekuasaan, sehingga proses pembebasan berlaku terhadap semua manusia—baik yang tertindas maupun penindas. Freire mengidentifikasi tiga tingkatan kesadaran, yaitu semi-intransitif, naif, dan kritis transitif. Di dasar tingkatan kesadaran ini, yang paling bawah yaitu kesadaran intransitif, dimana seseorang benar-benar tidak sadar akan posisi mereka dan hanya terikat pada kebutuhan jasmani, tidak sadar akan sejarah dan tenggelam dalam masa kini yang menindas (Manggeng, 2005:42). Tiga tingkatan kesadaran lainnya dijabarkan sebagai berikut:

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan studi kasus berkaitan dengan *consciousness raising* suku Baduy, dimana keberadaan Suku Baduy saat ini antara 5000-8000 orang (Swarna, 2013). Baduy merupakan salah satu suku yang menerapkan isolasi dari dunia luar.

Jika sekarang kita mengenal kelompok masyarakat ini dengan sebutan “Baduy”, maka sejatinya sebutan itu bukanlah berasal dari mereka sendiri. Istilah “Baduy” semula berakar dari kata *badoe'i*, *badoei*, dan *badoewi*, yang diberikan oleh orang-orang Belanda ketika membuat laporan etnografi di wilayah Lebak ini (Permana, 2010: 27). Sedangkan, orang Baduy sendiri lebih senang jika disapa atau menyebut dirinya dengan *Urang Kanekes* atau *Urang Rawayan*.

Suku Baduy tergolong ke dalam masyarakat terasing yang mendiami 53 kampung di Desa Kanekes, kawasan Pegunungan Kendeng, dengan kondisi alam yang berbukit-bukit berada di ketinggian 500-1.200 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini juga dilewati aliran Sungai Cijung. Secara administratif, Desa Kanekes termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dengan tanah hak ulayat seluas 5.136,58 hektar, masyarakat Baduy mendapat kewenangan untuk mengelola sendiri kawasan adat tersebut. Daerah yang dijadikan hunian berada di celah bukit, lereng tebing, dan lembah yang ditumbuhi pepohonan besar. Di sekeliling alam lingkungan merupakan padang ilalang dan semak belukar yang hidup dengan suburnya. Perkampungan dibangun secara berkelompok dengan jarak dari satu kampung ke kampung lainnya belasan kilometer, dihubungkan dengan jalan setapak (Hendriawan, 2017).

Dari segi budaya, orang Baduy atau Urang Rawayan adalah sekelompok komunitas Sunda yang kebudayaannya dianggap *culture minority* (kebudayaan minoritas). Namun Orang Baduy sangat cerdas dalam memelihara identitas diri etnisnya. Identitas diri pada umumnya ditampakkan lewat cara berpakaian. Pakaian orang Baduy, sangat khas berciri etnik. Mereka tidak malu berpakaian yang tidak biasa digunakan masyarakat umumnya.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dari segi materi orang Baduy belum pernah mengharap bantuan dari luar. Mereka mampu secara mandiri dengan cara bercocok tanam dan berladang, menjual hasil kerajinan tangan khas Baduy, seperti Koja dan Jarog (tas yang terbuat dari kulit kayu Teureup); tenunan berupa selendang, baju, celana, ikat kepala, sarung serta golok/parang, juga berburu. Lauk istimewa bagi orang Baduy adalah ikan asin.

Masyarakat Baduy bagaikan sebuah “negara” yang tatanan hidupnya diatur oleh hukum adat yang sangat kuat. Seperti halnya dituturkan oleh Kamlan (55 tahun) warga Baduy Dalam ketika ditanya mengenai keikutsertaan dalam Pemilu: “*Kami mah ngilu kumaha Puun bae*” (Kami mengikuti perintah kepala suku).

Orang Baduy bertutur dengan bahasa Sunda. Permana (2010), menyebut bahasa Baduy termasuk dialek Sunda-Banten, khususnya subdialek Baduy. Selain itu bahasa Baduy memiliki kosa kata tersendiri dan beberapa jenis struktur kalimat. Bahasa yang dipakai mereka tidak mengenal tingkatan bahasa atau pemakaian bahasa berdasarkan status sosial. Rasa hormat pada orang lain tidak diperlihatkan lewat kata-kata khusus, tetapi lewat tingkah laku mereka. Adat mengharuskan mereka berbahasa Sunda untuk mempertahankan kemurnian budaya masyarakat. Namun, tak sulit menemukan orang Baduy yang bisa berbahasa Indonesia, terutama bagi Baduy Luar. Mereka yang fasih berbahasa Indonesia, biasanya Baduy Luar yang sering bepergian ke kota.

Di antara kelompok yang menjalankan konsep *consciousness raising* bagi suku Baduy adalah KH Zainuddin Amir, Pimpinan Pondok Pesantren Modern Sultan Hasanuddin, Leuwidamar, dan KH Izzuddin, dari FKPM (Forum Komunikasi Pondok Modern) Lebak. Keduanya termasuk orang yang aktif melakukan pemberdayaan dalam konteks komunikasi pembangunan karakter bagi orang-orang Baduy. Bahkan Zainuddin Amir, diakuinya sudah melakukan *consciousness raising* ini sejak tahun 1980. Zainuddin menyebut lima cara dalam mensosialisasikan peningkatan penyadaran terhadap masyarakat Suku Baduy, yaitu dengan (1) keagamaan, (2) pendidikan, (3) keamanan, (4) pemukiman dan (5) kesejahteraan.

Dalam kegiatan keagamaan, misalnya, warga Baduy yang beragama Islam sedikit demi sedikit melaksanakan syariat Islam seperti pelaksanaan khitan bagi anak laki-laki yang biasa dilaksanakan orang muslim pada umumnya. Mereka menyebut tukang khitan dengan sebutan *bengkong*. Rupanya kata *bengkong* ini, berasal dari bahasa “kirata” atau dikira-kira tapi nyata yaitu, “anakna jebeng bapakna ngawangkong,” artinya, anaknya menangis setelah disunat sedang ayahnya *ngobrol* dengan tukang sunat tersebut. Menurut Izzudin, keterlibatan pondok pesantren dan FKPM tersebut, menjadi *distingsi* bahwa sebagian Suku Baduy dewasa ini tengah berubah mengikuti perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan tradisi yang mereka anut. Izzudin menyebutkan, di antara kegiatan FKPM adalah mengawal program pemerintah seperti penyelenggaraan pendidikan dan sosialisasi Pemilu.

### **Partisipasi Politik**

Partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, sesuai yang dimaksud keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (Huntington dan Nelson, 1997). Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya menganggap jika partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Budiardjo, 2008).

Bagi masyarakat Baduy, setiap kegiatan Pemilihan Umum selalu menyesuaikan kondisi serta kebutuhan dan pertimbangan adat. Masyarakat Baduy telah mengikuti pemilihan umum setelah reformasi sebanyak lima kali yakni, Pemilu 2004, Pilkada Provinsi 2008, Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pilkada

Provinsi 2017. Sebelum reformasi masyarakat Baduy tidak menggunakan hak suaranya, mereka lebih memperhatikan dan memilih diam dengan istilah Lunang (*milu kanu meunang*) artinya ikut pada yang menang (Kurnia, 2010:279). Partisipasi dalam Pemilihan Umum menurut Nimmo adalah tipe partisipasi rakyat yang dipublikasikan dengan memberikan suara.

Namun terdapat berbagai kemungkinan tindakan pemilihan itu dari yang paling mudah hingga yang paling sulit dalam penggunaan waktu, uang dan energi (Nimmo, 2010: 132). Pertama, identifikasi dengan partai politik yakni ikatan erat kepada partai politik utama yang satu atau yang lain. Kedua, pendaftaran untuk memilih, meliputi syarat-syarat seseorang memiliki hak dalam pemilihan umum, seperti usia, domisili, dll. Ketiga, pemberian suara dalam pemilihan umum meliputi tingkat partisipasi khalayak dalam mengikuti pemilu. Keempat, pengambilan bagian dalam kampanye, apakah khalayak dalam satu komunitas tersebut secara aktif mengambil bagian dalam proses kampanye (Nimmo, 2010: 134).

Pada Pilkada Banten 2017 lalu, Pasangan Rano-Embay nomor urut 2 unggul di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di kawasan pedalaman masyarakat Baduy. Pilkada Banten di kawasan Baduy dari empat TPS tercatat 954 suara dan pasangan Rano-Embay unggul dengan meraih 634 suara. Sedangkan, perolehan suara pasangan Wahidin-Andika sebanyak 320 suara. Meski demikian, secara keseluruhan di Provinsi Banten, suara terbanyak diraih oleh pasangan Wahidin-Andika yang kini sudah ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Selama ini, Pilkada Banten di kawasan masyarakat Baduy berlangsung aman dan lancar. Dalam partisipasi politik, minat masyarakat Baduy cukup antusias dengan mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Partisipasi yang meningkat ini adalah bukti dari suksesnya sosialisasi politik di kalangan suku Baduy baik yang dilakukan oleh tokoh masyarakat ataupun pemerintah. Suku Baduy yang dahulu sangat tertutup terhadap hal-hal baru dari dunia luar, kini telah membuka diri dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Pemerintah juga mengakomodasi kepentingan suku Baduy, karena walau bagaimanapun, suku Baduy adalah bagian dari Indonesia dan merupakan warga negara Indonesia juga.

Terkait dengan konteks Pemilu, masyarakat Baduy, terbagi menjadi 2 (dua) struktur yang mempengaruhi perilaku mereka. Struktur pertama adalah aturan adat atau amanat leluhur *Pikukuh Karuhun* yang dipegang teguh warga Baduy Luar. Sedangkan struktur kedua adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu beserta peraturan turunannya, yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Struktur adat dilegitimasi oleh lembaga adat yang dipimpin oleh Pu'un, beserta *Jaro* sebagai jajarannya, dan *Pangiwa* sebagai ujung tombak ke masyarakat. Sementara struktur peraturan Pemilu dilegitimasi oleh KPU, KPUD, dan PPS beserta aparat pemerintahan Desa.

Kemudian kekuasaan legitimasi merupakan kemampuan untuk mendesak pengaruhnya karena posisi atau jabatan sosialnya, yaitu *Pu'un* dan tokoh-tokoh adat, serta pemerintah (Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi). Bentuk kepercayaan dan kesederhanaan ini merefleksikan nilai kejujuran yang ada di warga Baduy Luar. Warga Baduy Luar memandang penting nilai kejujuran karena dapat menggambarkan nilai kesederhanaan dan kepercayaan antar sesama warga.

Pemilu menurut tokoh adat Baduy tidak terlalu berpengaruh, karena tatanan sistem yang berlaku antara masyarakat Baduy dan di luar Baduy berbeda. Sehingga dampak yang ditimbulkan dari proses demokrasi tersebut tidak terlalu berpengaruh kepada komunitas adat baduy secara keseluruhan. Partisipasi sebagian masyarakat Baduy dalam pemilu tersebut untuk membuktikan bahwa masyarakat Baduy juga peduli dan menghargai pemerintah (Kurnia, 2010).

### **Suku Baduy Era Digital**

Komunitas Baduy tidak tahu bentuk tulisan, mereka hanya tahu yang diucapkan bahasa. Oleh karena itu, komunikasi mereka diwariskan dari generasi ke generasi dalam bentuk naratif. Komunitas Baduy melihat catatan waktu dan semua peristiwa dalam kehidupannya, sebagai proses yang setara dengan keadaan alam semesta (Pawiro, 2013). Asal-usul dan penamaan Baduy sendiri dapat dibagi menjadi dua istilah: yaitu istilah yang diberikan oleh orang di luar komunitas dan istilah yang mereka sebut sendiri. Istilah mana yang lebih dikenal akan bergantung pada frekuensi istilah yang sedang digunakan. Ditegaskan Edi S Ekadjati (2009), nama Baduy saat ini telah digunakan sebagai sebutan untuk sekelompok orang yang tinggal di Desa Kanekes, tampaknya diberikan setelah Islam memasuki daerah Banten utara pada abad ke-16.

Suku Baduy adalah sekelompok penduduk asli yang mendiami daerah sekitar gunung Kendeng Ciujung, secara administratif wilayah Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Luas tanah dari Baduy seluas 5.101,85 hektar (Asep Kurnia: 2010). Sebagian besar lahan dibuat dataran tinggi pegunungan dengan lembah dari lembah sungai dan bagian atas dari sungai yang mengalir ke utara. Bagian tengah dan selatan desa adalah hutan lindung atau orang Baduy sering menyebutnya leuweung karamat (dilindungi hutan). Suku Baduy memiliki tiga tangtus (kursi pemerintahan), yang berbasis di Cikeusik Cikertawana, dan Cibeo. Selain ketiga lembur (desa), ada 58 permukiman desa lainnya dari komunitas Baduy Luar. Berdasarkan mereka pemukiman, orang Baduy dibagi menjadi tiga kelompok yang hidup berbeda daerah. Grup-grup ini adalah:

*Pertama*, Baduy Dalam (Kanekes Dalam). Komunitas Baduy Dalam hidup di tiga wilayah utama, yaitu Cikeusik, Cikertawana dan Cibeo. Masyarakat ini sedang berlatih pikukuh karuhun (tradisional bea cukai), misalnya, mereka hanya diizinkan memakai pakaian dengan dua warna-warna itu hitam dan putih, dan di samping itu mereka juga memakai totopong putih (bando). Baduy tidak menggunakan benda modern, seperti elektronik dan bahan kimia. Mereka membuat pakaian mereka sendiri dari bahan-bahan alami ditemukan di sekitar komunitas. Jika pakaian itu dijahit, tentu mereka menjahitnya diri mereka sendiri dengan tangan (Kurnia, 2010).

*Kedua*, Baduy Luar (Kanekes Luar). Kelompok kedua adalah Baduy Luar yang dicirikan oleh pakaian hitam atau biru gelap. Mereka juga memakai ikat kepala dengan warna biru dan pra-dominan biru batik. Komunitas ini tinggal di desa-desa sekitar wilayah utama Desa Kanekes. Komunitas Baduy Luar adalah Baduy yang terisolasi karena beberapa alasan seperti melanggar adat istiadat di daerah *Inner* Kanekes, menikah seseorang di luar *Inner* Kanekes, atau mengundurkan diri dari Baduy Dalam dengan berbagai alasan. Awalnya, Baduy Luar adalah Baduy, siapa ditugaskan untuk menjaga keaslian Baduy dalam fungsi mereka sebagai filter untuk setiap budaya asing (wawancara dengan Kepek (53),

warga Baduy Luar). Karena itu Komunitas Baduy Luar ada sekarang menggunakan peralatan modern seperti ponsel, barang elektronik, bahan kimia, dan perangkat teknologi lainnya. Namun di beberapa acara, masyarakat Baduy luar masih menerima dan mengakui tradisi Baduy pribumi.

*Ketiga*, yaitu Dangka Baduy, adalah mereka yang benar-benar telah meninggalkan Baduy, baik secara geografis maupun budaya. Mereka adalah keturunan dari Baduy Dalam atau Luar, tetapi umumnya tidak tinggal di daerah Kanekes misalnya tinggal di daerah Kumpul di kecamatan Lewidamar. Meskipun mereka tidak melakukannya harus mengamati tradisi Baduy, mereka masih mengaku sebagai orang Baduy dan dalam beberapa hal mereka masih mengikuti adat orang Baduy. Ini adalah terbukti ketika ritual diadakan di daerah Baduy Dalam, beberapa dari mereka masih bergabung.

Meskipun kawasan Baduy relatif terpencil, tetapi mereka tidak harus ketinggalan informasi. Masyarakat Baduy memiliki hak yang sama dengan warga negara lain. Masyarakat Baduy berhak memperoleh sarana telekomunikasi yang memadai, untuk itu beberapa vendor telekomunikasi berusaha menghadirkan sarana internet ke Lebak maupun wilayah terpencil lainnya.

Masyarakat Baduy bukanlah masyarakat dengan adat istiadat kaku. Dalam beberapa konsep adat, terkait dengan struktur budaya mereka sendiri, suku Baduy sangat ketat, tetapi dalam hal-hal yang berkaitan dengan budaya orang lain, mereka terbuka, hormat, dan bersimpati dan terkadang mereka mengadopsi budaya orang lain yang tentu saja, tidak bertentangan dengan budaya mereka sendiri. Kita dapat mengajukan mengetahui, bagaimana *Consciousness Raising* menurut Baduy saat menerima pengaruh dan pemanfaatan akses informasi digital.

Pada 2010, misalnya, diresmikan Pusat Pelatihan Internet di SD Negeri II Bojong Menteng, kawasan Baduy, di Desa Ciboleger, Leuwidamar, Kabupaten Lebak dilanjutkan dengan peresmian pelatihan internet bagi masyarakat Baduy, guru-guru, siswa dan masyarakat di Kabupaten Lebak. Pelatihan internet yang sepenuhnya difasilitasi oleh BUMN PT Telkom tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan memanfaatkan internet. Kepek (53), seorang warga Baduy Luar mengatakan, dalam bahasa Indonesia: *Asalkan ada kuota internet kami tidak merasa kesulitan berhubungan dengan dunia luar*. Bagi warga Baduy, internet juga bermanfaat untuk pendidikan, membuka wawasan, maupun menunjang berbagai aktivitas kehidupan lainnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Komunikasi pembangunan dapat berperan dalam pengembangan masyarakat pedesaan yang terisolir dari dunia metropolis. Konsep peningkatan kesadaran kritis Suku Baduy sangat memungkinkan untuk berubah menuju kondisi yang lebih baik. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa ***consciousness raising* sebagai proses komunikasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur partisipasi politik pada Suku Baduy**. Jika merujuk pada studi Freire, tingkat kesadaran Suku Baduy dapat digolongkan pada **kesadaran magis atau semi-intransitif**. Tingkat kesadaran ini ditandai dengan penerimaan Suku Baduy terhadap kekuatan magis, dimana mereka tidak memiliki kontrol sehingga harus patuh pada situasi-situasi tertentu.

Di lain pihak keterlibatan mereka yang cukup signifikan pada setiap Pemilu menjadi bukti ketaatan Suku Baduy terhadap aturan pemerintah. Meskipun dalam situasi tertentu struktur adat memiliki kekuasaan untuk melarang masyarakatnya mengikuti Pemilu atau Pilkada. Maka di sinilah pentingnya sinergi antara pemerintah dan stakeholder dalam pemberdayaan *consciousness raising* di Suku Baduy, seperti yang dilakukan oleh KH Zainuddin Amir dan KH Izzuddin melalui berbagai kegiatan sosialisai dan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Abdurrahman Misno Bambang Pawiro. 2013. Baduy Pluralism: From Myth to Reality. *Al-Albab Borneo Journal Of Religious Studies (BJRS)*, Vol 2 (1): 111-124.
- Manggeng, Marthen. 2005. Pendidikan Yang Membebaskan Menurut Paulo Freire dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia. *INTIM - Jurnal Teologi Kontekstual*, vol 8 (Semester Genap): 41-44.

### Buku

- Budiardjo, Miriam. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT GramediaPustakaUtama.
- Budiman, A. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ekadjati, Edi S. 2010. *Kebudayaan Sunda (Suatu Tinjauan Sejarah)*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Freire, Paulo. 1970. *Pedagogy of the oppressed*. New York: The Seabury Press.
- Freire, Paulo. 1984. *Pendidikan sebagai praktek pembebasan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Freire, Paulo. 1999. *The Politic of Education: Culture, Power, and Liberation*. (Terjemahan). Yogyakarta: Penerbit ReaD (Research, Education and Dialog).
- Freire, Paulo. 2000. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: LP3ES.
- Harun R, Ardianto E. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta (ID): Rajawali Press.
- Hendriawan, Aep Dian. 2017. *Pesona Wisata di Tanah Lebak*. Lebak: Bagian Humas Setda Kabupaten Lebak
- Kurnia, Asep dan Ahmad Syihabudin. 2010. *Saatnya Badui Bicara*. Jakarta: Bumi Aksara dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Naisbitt, John. 1984. *Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives*, Warner Books.
- Nimmo, Dan. 2011. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- P. Huntington, Samuel dan Joan M. Nelson. 1997. *No Easy Choice: Political Participation In Developing Countries* Cambridge. Mass: Harvard University Press
- Permana. Eka. Cecep. 2010. *Kearifan Lokal masyarakat Baduy dalam Mitigasi Bencana*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Rogers, E. M (Ed). (1989) *Komunikasidan Pembangunan: Perspektif Kritis*. Jakarta: LP3S.

Sajogyo, ed. (1997). *Menciptakan Visi: Mendukung Pengembangan Kelompok Swadaya Mandiri dalam Gerakan Nasional PPK*. PuspaSwara: Jakarta.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.

Schramm, Wilbur. 1964. *“Mass Media and National Development: The Role of Information in Developing Countries”*. Sanford University Press. Stanford, California and UNESCO, Place de Fontenoy. Paris.